

PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUBBAG OTONOMI DAERAH BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI NTB

Ni Wayan Suar Dewi¹, Ida Ayu Nyoman Sutriani²

Program Studi Manajemen Ekonomi, Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

suarrdewi21@gmail.com¹ dayunyoman23@gmail.com²

Abstract. *The report on the implementation of regional governance serves as a form of accountability from the regional government to the central government, detailing the performance achievements of regional governance over a single fiscal year. This study focuses on analyzing budget allocation and utilization, as well as identifying the challenges encountered and the measures taken during the preparation of the regional governance implementation report within the Regional Autonomy Sub-division of the Bureau of Governance and Regional Autonomy, under the Regional Secretariat of West Nusa Tenggara Province. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation. The findings indicate that the Sub-division received a budget allocation of IDR 210,000,000. Of this amount, IDR 6,640,000 was utilized, leaving a remaining balance of IDR 13,360,000. However, this budget was not exclusively earmarked for the preparation of the regional governance implementation report; rather, it was also allocated for other activities, such as the Accountability Statement Report (LKPD), Regional Autonomy Day, and the Evaluation of Regional Governance Implementation (EPPD). Specifically, regarding the preparation of the regional governance implementation report, a total of IDR 29,740,000 was utilized to meet various requirements.*

Keywords: Budget management; Effectiveness; LPP Preparation; Regional autonomy; West Nusa Tenggara

Abstrak. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, untuk melaporkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah satu tahun anggaran. Studi ini berfokus pada analisis alokasi dan penggunaan anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya yang diambil dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Subbag Otonomi Daerah, pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Subbag menerima alokasi anggaran yang cukup besar, yakni mencapai Rp 210.000.000, sebanyak Rp 6.640.000 telah di realisasikan, sehingga menyisakan saldo sebesar Rp 13.360.000. Akan tetapi, anggaran tersebut tidak dikhususkan semata-mata untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga dialokasikan untuk kegiatan lain, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPD), hari Otonomi Daerah, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Secara khusus, terkait dengan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah digunakan anggaran sebesar Rp 29.740.000 untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Kata kunci: Pengelolaan anggaran; Efektivitas; LPPD; Otonomi Daerah; Nusa Tenggara Barat

1. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung otonomi daerah yang efektif, pengelolaan anggaran sangat berperan penting, pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari penggunaan anggaran karena anggaran menjadi salah satu komponen yang penting untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan (Abdullah, 2025; Akbar et al., 2022). Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan daerah dituntut untuk melaksanakan pemerintah secara tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan (Devinci et al., 2022; Retnosari et al., 2022). Transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting dalam pemerintahan yang menggambarkan kondisi serta tingkat kelayakan pertanggungjawaban (Shahib et al., 2022). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yaitu pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang, Laporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dimana laporan tersebut disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas selama satu tahun anggaran. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyusun laporan tersebut sebagai bentuk laporan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun terakhir (Mutmainah et al., 2024). Selama penyusunannya dibutuhkan kelengkapan data dari berbagai perangkat daerah, sehingga mengharuskan adanya koordinasi, pengumpulan, pengolahan, pemeriksaan, dan penyesuaian data supaya informasi yang disampaikan secara akurat, konsisten, lengkap, tepat waktu, serta dapat diverifikasi (Hikmah & Isbandono, 2024; Syafrilia & Widayanti, 2021). Dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran mempunyai peran penting dan mencakup lebih dari sekedar besarnya dana yang ada melainkan juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban (Juliyanti et al., 2025).

Sesuai dengan data yang diperoleh, pada Biro Pemerintahan dan OTDA menerima alokasi anggaran pada tahun 2026 sebesar Rp517.293.500 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Anggaran tersebut kemudian dialokasikan ke empat bagian, yaitu bagian tata usaha sebesar Rp77.293.500, bagian kerja sama sebesar Rp130.000.000, bagian pemerintahan sebesar Rp100.000.000, dan bagian otonomi daerah sebesar Rp210.000.000. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan agar berjalan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian. Berdasarkan perhitungan, alokasi pada bagian Otonom Daerah memperoleh porsi anggaran paling besar, yaitu sebesar Rp210.000.000. Besarnya anggaran belum dapat dijadikan indikator langsung bahwa

pengelolaan anggaran telah berjalan secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Subbagian Otonomi Daerah (Fahsa & Nustini, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana anggaran sebesar Rp210.000.000 dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Subbagian otonomi daerah dan kontribusinya dalam mendukung kelancaran dalam proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta apakah terdapat kendala yang sedang dihadapi dalam penyusunannya. Proses tersebut tidak hanya membutuhkan biaya administrasi, tetapi juga membutuhkan koordinasi dan sumber daya manusia yang memadai.

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian ini meliputi, penelitian Fahreza dan Priyambodo (2025) yang mengkaji efektivitas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pemerintahan Kota Mataram dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kemudian, Hikmah dan Isbandono (2024) meneliti Efektivitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023. Sementara itu, Mutmainah et al., (2024) berfokus pada pengembangan sistem informasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fahreza & Priyambodo, 2025; Hikmah & Isbandono, 2024; Mutmainah et al., 2024). Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus analisis, yaitu pengalokasian anggaran, pemanfaatan anggaran serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Subbag OTDA, Biro Pemerintahan dan OTDA Setda Provinsi NTB.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merupakan komponen dari pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk mengatur pemanfaatan sumber daya keuangan, guna memastikan dukungan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang menjabarkan tahapan proses pengelolaan anggaran di pemerintah daerah, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kelima tahapan ini harus dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Kegagalan pada salah satu tahapan tersebut dapat mengganggu kualitas tata kelola keuangan secara keseluruhan (Juliyanti et al., 2025). Perencanaan berkaitan dengan penentuan kebutuhan dan alokasi anggaran, pelaksanaan berkaitan dengan penggunaan anggaran sesuai kegiatan, penatausahaan berkaitan dengan pencatatan dan pengadministrasian transaksi, sedangkan

pelaporan dan pertanggungjawaban berkaitan dengan penyajian serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Efektivitas

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut James L. Gibson dkk (Pasolong, 2019), efektivitas berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, suatu kegiatan dianggap semakin efektif apabila semakin banyak target yang direncanakan berhasil (Ariyani et al., 2024). Penilaian terhadap efektivitas dapat didekati dari berbagai sudut pandang, bergantung pada pihak yang melakukan evaluasi. Menurut (Mokoginta et al., 2021), efektivitas dapat ditinjau melalui tiga indikator: perencanaan tujuan, integrasi, dan adaptasi.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bersifat menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara menyeluruh dan kontekstual melalui wawancara, dan analisis dokumentasi (Abdussamad, 2021; Anugrah et al., 2023; Supriandi, 2025). Penelitian ini tidak hanya menilai besarnya anggaran, tetapi mengkaji alokasi, pelaksanaan, pemanfaatan anggaran serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakukan pada Subbag Otonomi Daerah, Biro Pemerintahan dan OTDA Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasi tersebut dipilih karena Subbag Otonomi Daerah merupakan bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan dan mendukung proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi NTB. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi penting dalam penelitian ini karena wawancara menggali tentang proses pengelolaan anggaran secara mendalam dari narasumber, sementara dokumentasi menyediakan bukti administratif serta pelengkap dalam wawancara (Ardiansyah et al., 2023; Septiana et al., 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengalokasian anggaran pada Subbagian Otonomi Daerah

Tabel 1. Pengalokasian anggaran pada Subbagian Otonomi Daerah

No	Bagian	Uraian pembelian	Jumlah (Rp)	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Fasilitasi administrasi	ATK dan bahan cetak	Rp 999.900	Rp 4.100.000	Rp 3.100.100

**PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUBBAG OTDA BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI NTB**

	kepala daerah dan DPRD	Makanan dan minuman rapat	Rp 300.000	Rp 900.000	Rp 600.000
		perjalanan dinas biasa	Rp 27.054.940	Rp 50.000.000	Rp 22.945.060
Total			Rp 28.354.840	Rp 55.000.000	Rp 26.645.160
	Pengembangan otonomi daerah	ATK, kertas dan cover	Rp 800.000	Rp 800.000	0
2.	dan penataan urusan	Makanan dan minuman rapat	0	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
		perjalanan dinas biasa	Rp 5.840.000	Rp 18.000.000	Rp 12.160.000
Total			Rp 6.640.000	Rp 20.000.000	Rp 13.360.000
	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	ATK, kertas, cover, bahan cetak dan bahan komputer	Rp 38.436.800	Rp 40.890.000	Rp 2.453.200
3.		Makanan dan minuman rapat	Rp 7.680.000	Rp 8.010.000	Rp 330.000
		Honorium dan perjalanan dinas biasa	Rp 84.794.740	Rp 86.100.000	Rp 1.305.260
Total			Rp 130.911.540	Rp 135.000.000	Rp 4.088.460
TOTAL SELURUH			Rp 165.906.380	Rp 210.000.000	Rp 44.093.620

Sumber : Data SPJ fungsional, 2026

Tabel 1 menunjukkan pengalokasian dan realisasi anggaran pada Subbagian Otonomi Daerah tahun 2026. Kegiatan fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD menerima anggaran berjumlah Rp55.000.000 anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp 28.354.840 dan sisa anggaran sebesar Rp 26.645.160. Kegiatan pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan menerima anggaran sebesar Rp20.000.000 dengan jumlah anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp 6.640.000 dan sisa anggaran sebesar Rp 13.360.000. Selanjutnya, kegiatan evaluasi

**PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUBBAG OTDA BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI NTB**

dan penyelenggaraan pemerintahan menerima anggaran sebesar Rp 210.000.000, dari jumlah tersebut, anggaran yang telah digunakan mencapai Rp 165.906.380, serta sisa anggaran sebesar Rp 44.093.620. Dengan demikian, tingkat realisasi anggaran mencapai sekitar 78,99% atau dibulatkan menjadi 79%. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kegiatan yang paling dominan dan menerima anggaran terbesar serta memiliki tingkat penyerapan anggaran paling tinggi dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf pada Subbag Otonomi Daerah, kegiatan OTDA terbagi menjadi tiga bagian meliputi: fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, pengembangan otonomi daerah dan penataan urusan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Dari ketiga bagian tersebut, kegiatan evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan memperoleh anggaran terbesar dibandingkan dengan kegiatan yang lain.

B. Pengalokasian anggaran yang mendukung penyusunan LPPD

Tabel 2. Pengalokasian anggaran pada penyusunan LPPD

No	Uraian	Rincian perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
1.	Fotocopy	5000 Lembar	Lembar	Rp 300.000	0%	Rp 1.500.000
2.	Jilid ketebalan	1 Buku	Buku	Rp 265.000	0%	Rp 265.000
3.	Makanan dan minuman rapat biasa (Kudapan/snack)	140 orang/kali	Orang	Rp 15.000	0%	Rp 2.100.000
4.	Makanan dan minuman rapat biasa (Makan)	45 Orang / kali	Orang	Rp 35.000	0%	Rp 1.575.000
5.	Honorium tim Penyusunan LPPD-RLPPD					
	Anggota	45 Orang / kali	Orang / bulan	Rp 500.000	0%	Rp 22.500.000

**PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA SUBBAG OTDA BIRO
PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI NTB**

Koordinator	3 Orang / kali	Orang / bulan	Rp 600.000	0%	Rp 1.800.000
TOTAL SELURUH					Rp 29.740.000

Sumber : Data Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah, 2026

Tabel 2 menunjukkan bahwa anggaran secara khusus digunakan untuk mendukung proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Biaya fotokopi 5.000 lembar sebesar Rp1.500.000. Kemudian, biaya penjilidan dokumen dengan jumlah anggaran sebesar Rp265.000. Selanjutnya, biaya untuk kudapan atau snack sebesar Rp2.100.000, sedangkan biaya untuk makan sebesar Rp1.575.000. Alokasi anggaran terbesar pada Tabel 2 adalah honorarium tim penyusunan LPPD-RLPPD, yaitu sebesar Rp22.500.000, sedangkan honorarium koordinator sebesar Rp1.800.000. Jumlah keseluruhan honorarium mencapai Rp24.300.000. Secara keseluruhan, total anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan LPPD adalah sejumlah Rp29.740.000. Berdasarkan rincian tersebut, sebagian besar anggaran digunakan untuk membiayai honorarium tim, sedangkan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, penggandaan dokumen, penjilidan, dan konsumsi rapat.

Berdasarkan hasil wawancara, alokasi anggaran pada bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp210.000.000 tidak hanya diperuntukkan atau difokuskan untuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah saja, tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan lain, seperti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), hari Otonomi Daerah, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

C. Pemanfaatan anggaran dalam mendukung efektivitas proses penyusunan LPPD

Berdasarkan hasil wawancara, anggaran sudah dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan koordinasi, proses pengumpulan data, pengolahan informasi, serta penyusunan dokumen yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan efektivitas, anggaran terlihat pada tersedianya biaya untuk kegiatan administrasi, konsumsi rapat, penggandaan dokumen, serta honorarium tim. Oleh karena itu, anggaran merupakan salah satu sumber daya yang memungkinkan proses penyusunan berlangsung.

D. Kendala dan Upaya Mengatasi

Berdasarkan hasil wawancara, dari alokasi anggaran yang diterima pada bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya kegiatan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih menghadapi beberapa kendala. Adapun kendalanya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran

Meskipun anggaran yang dialokasikan untuk Subbag Otonomi Daerah tergolong besar, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Anggaran tersebut harus di optimalkan sebaik mungkin agar anggaran tidak berfokus pada satu kegiatan saja, tetapi juga pada kegiatan lain di Subbag Otonomi daerah. Subbag Otonomi Daerah perlu mengelola dan menggunakan anggaran secara cermat, efisien, dan bertanggungjawab agar dapat memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan berdasarkan prioritas yang sudah ditentukan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh narasumber, awalnya pertemuan kepada perangkat daerah sebelum proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah diadakan langsung atau secara tatap muka. Namun, karena keterbatasan anggaran dan harus mengoptimalkan anggaran, pertemuan kepada perangkat desa tidak diadakan. Untuk mengatasi kendala tersebut adapun upaya yang dilakukan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi komunikasi melalui media digital, seperti WhatsApp dan berbagai media daring lainnya. Penggunaan media tersebut membantu mempermudah proses komunikasi, koordinasi, serta pertukaran informasi tanpa mengharuskan seluruh pihak bertemu secara langsung. Koordinasi dengan perangkat desa tetap dapat dilaksanakan secara fleksibel tanpa memerlukan biaya pertemuan tatap muka. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi salah satu alternatif dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, efektivitas penggunaan media daring tetap bergantung pada cara pemanfaatannya serta kemampuan setiap pihak dalam menjaga komunikasi dan koordinasi agar berjalan dengan baik.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor

Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber, keterbatasan sarana dan prasarana di kantor masih menjadi salah satu kendala yang masih dihadapi selama kegiatan kerja sehari-hari. Beberapa fasilitas kantor yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terutama keterbatasan perangkat komputer serta pendingin ruangan (AC). Kondisi tersebut dapat memengaruhi kenyamanan lingkungan kerja dan menghambat kelancaran penyelesaian pekerjaan, khususnya ketika pegawai membutuhkan perangkat komputer untuk mengelola data, menyusun dokumen, mencetak berkas, maupun menyelesaikan tugas administrasi lainnya. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendingin ruangan juga dapat mengurangi

kenyamanan pegawai selama bekerja, terutama ketika kondisi ruangan terasa panas. Untuk mengatasi kendala keterbatasan sarana dan prasarana kantor tersebut, pegawai melakukan beberapa upaya mandiri agar kegiatan kerja tetap berjalan secara efektif. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut dengan membawa laptop pribadi sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan pekerjaan ketika komputer kantor tidak tersedia atau sedang digunakan oleh pegawai lain. Dengan menggunakan laptop pribadi, pegawai tetap dapat melaksanakan berbagai kegiatan administrasi, seperti mengetik dokumen, mengolah data, menyusun laporan, dan menyiapkan berkas yang diperlukan. Selain itu, pegawai juga membawa kipas angin pribadi apabila diperlukan untuk membantu meningkatkan kenyamanan selama berada di ruang kerja. Upaya tersebut menunjukkan adanya inisiatif dan tanggung jawab pegawai dalam menyesuaikan diri terhadap keterbatasan fasilitas yang tersedia. Meskipun demikian, pemenuhan sarana dan prasarana di kantor yang memadai tetap diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan nyaman. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian dari pihak terkait untuk melakukan evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas kantor serta mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pegawai, sehingga kegiatan operasional dan pelayanan administrasi dapat berjalan secara optimal.

3. Kekurangan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya Manusia adalah salah satu kendala yang masih dihadapi dalam proses penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk membantu penyelesaian laporan tersebut. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan pentingnya pembagian tugas dan koordinasi yang lebih optimal agar seluruh tahapan pelaksanaan penyusunan laporan dapat terlaksana dengan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat mendukung pengumpulan data, pengolahan data, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi informasi, penyusunan, serta penyempurnaan laporan sesuai dengan ketentuan atau format yang ada dan berlaku dan pengarsipan. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, berdasarkan hasil wawancara, pihak terkait melibatkan atau meminta bantuan pegawai dari Biro lain untuk bergabung dalam tim penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk membantu meringankan beban kerja yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan, solusinya adalah menambah sumber daya manusia dapat mendukung kelancaran penyelesaian setiap tahapan pekerjaan. Melalui kerja sama antarpegawai dari

berbagai Biro, proses pengumpulan data, pengolahan data, pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi informasi, penyusunan, serta penyempurnaan laporan sesuai dengan ketentuan atau format yang berlaku dan pengarsipan dapat berjalan lebih terkoordinasi. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dapat diatasi melalui kolaborasi dan pembagian tugas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan tepat waktu.

Dari kendala dan upaya tersebut jika dikaitkan dengan teori efektivitas dengan indikator, meliputi pencapaian tujuan, penggunaan anggaran telah diarahkan pada kebutuhan yang secara langsung berkaitan dengan penyusunan dokumen. Dari sisi integrasi, Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) membutuhkan koordinasi dengan berbagai perangkat daerah karena data yang dibutuhkan berasal dari unit yang berbeda. Pemanfaatan media komunikasi digital membantu koordinasi ketika pertemuan tatap muka tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya upaya menjaga kesinambungan koordinasi dengan sumber daya yang tersedia. Dari sisi adaptasi, keterbatasan sarana dan prasarana kantor serta keterbatasan sumber daya manusia mendorong pegawai menggunakan perangkat pribadi dan melibatkan pegawai dari Biro lain. Adaptasi tersebut memungkinkan pekerjaan tetap berjalan, tetapi sekaligus menunjukkan bahwa dukungan fasilitas dan jumlah sumber daya manusia perlu diperbaiki agar efektivitas tidak bergantung pada upaya individual pegawai.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan anggaran pada Subbagian Otonomi Daerah di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Subbagian ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000, realisasi pengeluarannya mencapai Rp165.906.380 sekitar 78,99% dibulatkan menjadi 79%, dengan sisa anggaran sebesar Rp44.093.620. Anggaran tersebut tidak difokuskan pada satu bidang saja, melainkan didistribusikan ke dalam tiga ranah utama: Fasilitas Administratif Kepala Daerah dan DPRD, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, serta Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Secara khusus, dana sebesar Rp29.740.000 dialokasikan untuk mendukung penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Meskipun demikian, proses penyusunan tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana kantor yang terbatas, serta kekurangan sumber daya manusia. Kendala-kendala ini diatasi melalui

penggunaan media komunikasi digital, pemanfaatan perangkat pribadi, serta pelibatan staf dari biro lain. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik terbukti berperan penting dalam memastikan kelancaran dan ketepatan waktu penyusunan LPPD.

Saran yang dapat diberikan yaitu Subbagian Otonomi Daerah perlu melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran secara lebih cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap tahapan penyusunan LPPD, sehingga keterbatasan anggaran tidak menghambat kegiatan koordinasi dan pengumpulan data. Selain itu, pemenuhan sarana dan prasarana kerja, khususnya perangkat komputer yang mendukung pengolahan data dan penyusunan dokumen, perlu diperhatikan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ketersediaan sumber daya manusia juga perlu disesuaikan dengan beban pekerjaan melalui pembagian tugas dan koordinasi yang lebih terarah. Pemanfaatan media digital tetap dapat dilakukan sebagai alternatif untuk menghemat biaya koordinasi, tetapi perlu didukung dengan komunikasi dan pengelolaan data yang baik agar proses penyusunan LPPD tetap berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah. (2025). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Pilar Keberhasilan Otonomi Daerah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(10), 3372–3379. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i10.2964>
- Abdussamad, D. H. Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Akbar, D. S., Rudiana, I. F., Prawiranegara, B., & Aryanti, M. (2022). Assessing The Effectiveness and Efficiency of the Public Service Budget a Studi in One Region in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 37–46. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1189>
- Anugrah, P., Kustiawan, & Marliani, L. (2023). KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 488–500. <https://doi.org/10.25157/dak.v10i3.11755>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>

- Ariyani, N., Arlan, A. S., & Handayani, R. (2024). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI E-KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR CAMAT AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nesfi. *JURNAL MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*, 1(3), 622–633.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2), 51–70. <https://doi.org/10.59603/projemen.v9i2.44>
- Fahreza, D. R., & Priyambodo, V. K. (2025). EFEKTIVITAS PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA MATARAM BERBASIS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH. *Jurnal Praktik Akuntansi Bisnis*, 1(2), 484–501. <https://doi.org/10.29303/prakbis.v1i2.2791>
- Fahsa, D. S., & Nustini, Y. (2026). EVALUASI EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA UNIT BUDGETING SALAH SATU INSTANSI DI YOGYAKARTA. *Journal of Social and Economics Research*, 8(1), 1288–1301. <https://doi.org/10.54783/jsr.v8i1.1444>
- Hikmah, D. L., & Isbandono, P. (2024). *Efektivitas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023*. 3(4), 184–196. <https://doi.org/10.26740/inovant.v2i2.33432>
- Juliyanti, I., Zakaria, A., & Khairunnisa, H. (2025). PERAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 6(2), 375–386. <https://doi.org/10.21009/japa.0602.13>
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Mokoginta, R. H., Posumah, J. H., & Palar, N. (2021). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI KLINIK ASPIRASI DAN LAYANAN PENGADUAN (KINALANG) PADA ERA NEW NORMAL DI KOTA KOTAMOBAGU*. VII(110), 1–8.

- Mutmainah, A., Agitha, N., & Afwani, R. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SIPPPDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis Website. *Journal of Computer Science and Informatics Engineering*, 8(1), 20–30. <https://doi.org/10.29303/jcosine.v8i1.544>
- Pasolong, D. H. (2019). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*.
- Retnosari, M. C., Suryawati, C., & Harto, P. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 10(3), 231–240. <https://doi.org/10.14710/jmki.10.3.2022.231-240>
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103890/pp-no-13-tahun-2019>
- Septiana, N. N., Zulfatul Khoiriyah, & Shaleh. (2024). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS DALAM PENDEKATAN KUALITATIF Nyangfah*. 10(4), 233–243. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i04.5181>
- Shahib, H. M., Muhammad Ridwan Hasanuddin, Nurdin, Y., Siprianus, Palete, Fenny Mika, & Saputri, R. R. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pemerintah di Era Covid-19 Pada Website Pemerintah Daerah Se-Indonesia. *Jurnal Transformativ*, 8(1), 102–127. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.5>
- Supriandi, A. (2025). Pendekatan Penelitian Kualitatif. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 197–204. <https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4384>
- Syafrilia, N., & Widayanti, S. (2021). PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA. *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)*, 5(2), 125–147. <https://doi.org/10.47431/jirreg.v5i2.141>